

Polemik Program Makan Bergizi Gratis (MBG) Dan Kesenjangan Akses Pada Sekolah Nonformal: Studi Kasus PKBM Dalam Program Paket A

Ilmar Andi Achmad^{1*}, Emirati², Jumase Basra³

¹³ Pendidikan Non Formal, Universitas Muhammadiyah Bulukumba

² Pendidikan Bahasa Inggris, Universitas Muhammadiyah Bulukumba

*Author Correspondence. Email : ilmar.andiachmad22@gmail.com

<i>Informasi Artikel</i>	<i>Abstract</i>
<p>Kata Kunci: Polemik Program Makan Bergizi Gratis (MBG) Kesenjangan Akses Sekolah Nonformal PKBM Program Paket A</p> <p>Article history: Submitted: 15-09-25 Final Revised: 17-09-25 Accepted: 20-09-25 Published: 23-09-25</p>	<p>Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diluncurkan pada Januari 2025 bertujuan meningkatkan status gizi dan semangat belajar peserta didik di seluruh Indonesia. Namun pelaksanaannya menuai pro dan kontra, termasuk adanya laporan kasus keracunan serta dugaan makanan tidak layak konsumsi. Studi kualitatif ini menganalisis polemik MBG khususnya di Bulukumba, Sulawesi Selatan, melalui tinjauan literatur, berita lokal maupun nasional, serta dokumen resmi. Metode analisis isi diterapkan pada sumber berita lokal seperti Fajar, Radar Selatan, dan Jawapos, serta pernyataan pemerintah daerah dan Badan Gizi Nasional. Temuan menunjukkan bahwa di Bulukumba sempat muncul insiden paket MBG dianggap basi di SMPN 2 Bulukumba, yang memicu penolakan siswa dan penangguhan sementara. Pemerintah kabupaten kemudian memperketat pengawasan kualitas makanan melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi setempat. Persepsi publik beragam: sebagian khawatir atas mutu makanan, sementara sebagian lain mengapresiasi perhatian negara terhadap gizi. Dari sisi operasional, kendala logistik, kontrol mutu pemasok lokal, dan minimnya regulasi melalui peraturan presiden menambah kompleksitas pelaksanaan program. Artikel ini mengaitkan persoalan tersebut dengan konsep keadilan sosial menurut teori Rawls, nilai-nilai Pancasila, serta kerangka inklusif Amartya Sen yang menekankan pemerataan akses gizi dan pendidikan. Kesimpulannya, Bulukumba perlu menguatkan pengawasan program, melibatkan komunitas lokal seperti inisiatif “Bapak Asuh Stunting”, serta mereplikasi praktik baik nasional melalui kolaborasi lintas sektor. Rekomendasi kebijakan mencakup audit program MBG, penguatan kapasitas dinas terkait, dan pengesahan payung hukum formal agar manfaat gizi dan sosial MBG dapat dirasakan secara optimal dan merata di Bulukumba maupun tingkat nasional.</p>
<p>Article Info</p> <p>Keywords: The Controversy over the Free Nutritional Meal Program (MBG) Access Gap Non-Formal Schools; Community Learning Centers Package A Program</p> <p>Article history: Submitted: 15-09-25 Final Revised: 17-09-25 Accepted: 20-09-25 Published: 23-09-25</p>	<p>Abstract</p> <p><i>The Free Nutritious Meal (MBG) Program, launched in January 2025, aims to improve nutritional status and students' learning motivation across Indonesia. However, its implementation has sparked both support and criticism, including reports of food poisoning and allegations of unfit meals. This qualitative study analyzes the MBG controversy in Bulukumba, South Sulawesi, through a review of literature, local and national news, as well as official documents. Content analysis was applied to local news sources such as Fajar, Radar Selatan, and Jawapos, along with statements from the local government and the National Nutrition Agency. Findings indicate that in Bulukumba, incidents occurred where MBG meal packages were deemed spoiled at SMPN 2 Bulukumba, leading to student rejection and temporary suspension of the program. The district government subsequently tightened food quality monitoring through the local Nutrition Service Unit. Public perception is divided: some express concern over food safety, while others appreciate the state's attention to nutrition. Operationally, logistical challenges, supplier quality control, and the absence of strong regulations at the presidential level further complicate implementation. This article links the issue to Rawls' theory of social justice, the values of Pancasila, and Amartya Sen's inclusive framework, all of which emphasize equitable access to nutrition and education. In conclusion, Bulukumba needs to strengthen program monitoring, involve local communities through initiatives such as the “Bapak Asuh Stunting” program, and replicate national best practices through cross-sector collaboration. Policy recommendations include program audits, strengthening the capacity of relevant local agencies, and establishing a formal legal framework so that the nutritional and social benefits of MBG can be realized optimally and equitably both in Bulukumba and nationally.</i></p>

1. PENDAHULUAN

Pekerja anak, yaitu anak di bawah usia 18 tahun yang terlibat dalam kegiatan ekonomi, merupakan masalah serius yang mengancam pemenuhan hak dasar anak, terutama hak atas pendidikan dan perkembangan sehat. Secara global, target SDGs 2030 nomor 8.7 menekankan penghapusan segala bentuk pekerja anak pada 2025, namun tren terbaru menunjukkan perlu usaha lebih besar untuk mencapainya. Indonesia turut menghadapi tantangan ini. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), tahun 2024 prevalensi pekerja anak meningkat menjadi 2,17% dari total angkatan kerja (naik dari 1,72% pada 2023). Jumlah pekerja anak usia 15–17 tahun naik dari 1,01 juta pada 2023 menjadi 1,27 juta pada 2024. Fenomena ini terutama terjadi di daerah pedesaan dan sektor pertanian. Latar belakang masalah ini berkaitan dengan akar penyebab seperti kemiskinan keluarga, rendahnya akses pendidikan berkualitas, dan kebijakan perlindungan anak yang belum optimal. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis karakteristik pekerja anak serta mengevaluasi kebijakan terkini dalam upaya penghapusannya di Indonesia. Ruang lingkup kajian mencakup data statistik terbaru serta kebijakan pemerintah (lintas kementerian) terkait perlindungan anak dan pendidikan.

Permasalahan gizi masih menjadi beban kesehatan dan pendidikan di Indonesia. Data BPS (2024) menunjukkan 8,53% anak mengalami gizi kurang. Pemerintah melalui kemendikbud dan BGN meluncurkan program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada Januari 2025 untuk menjawab tantangan ini. Program nasional ini ditargetkan menjangkau jutaan siswa TK hingga SMA, pesantren, dan bahkan kelompok rentan seperti ibu hamil dan balita. Dalam perjanjian kerja sama resmi Kemendikbud-BGN dipertegas bahwa MBG tidak hanya memberi makan tapi juga membangun karakter (doa, kebersihan) serta meningkatkan kehadiran siswa di sekolah hingga ~99%. Pendanaan MBG telah masuk APBN 2025 (RAPBN) sebagai bagian kebijakan peningkatan sumber daya manusia.

Namun, MBG juga memicu kontroversi. Sejumlah kasus keracunan dan laporan makanan busuk tersebar di media. Misalnya di Sulawesi Selatan ditemukan paket nasi goreng dianggap basi, mengundang kecaman publik. Serikat guru (FSGI) bahkan mendesak moratorium MBG karena masalah keamanan gizi. Politik pun terseret; Presiden Prabowo sempat dikritik karena dinilai “menyalahkan siswa” dalam insiden keracunan, meski ia menyebut keberhasilan 99,995% dari 3,4 juta penerima. Bulukumba, Kabupaten di Sulawesi Selatan, menjadi studi kasus penting: wilayah ini

punya data penurunan stunting signifikan (33,7%→25,2% pada 2024) dan kini menjadi salah satu fokus program inklusif pemerintah.

Pendahuluan ini menempatkan MBG dalam konteks nasional: mengangkat semangat keadilan sosial Pancasila yang menuntut pemerataan (gizi dan pendidikan), namun juga tensi politik dan operasional program skala besar. Selanjutnya tulisan ini menyoroti kondisi MBG di Bulukumba: bagaimana pelaksanaannya, respon warga, dan relevansinya dengan teori keadilan dan inklusivitas kebijakan.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Keadilan sosial dan kebijakan inklusif menjadi kerangka konseptual bagi analisis ini. Teori keadilan Rawlsian menggarisbawahi prinsip justice as fairness, menuntut distribusi sumber daya yang adil dan melindungi kelompok rentan. Pancasila sila ke-5 menegaskan pentingnya pemerataan sumber daya dan kesempatan bagi seluruh rakyat (ekonomi, pendidikan, kesehatan). Dalam hal ini, program gizi sekolah dapat dipandang sebagai wujud prioritas bagi yang paling lemah (perbedaan Rawls) – misalnya, anak sekolah dari keluarga kurang mampu memperoleh akses makanan sehat. Demikian pula, Amartya Sen memperluas konsep keadilan sosial secara inklusif; beliau menekankan pentingnya memperhatikan keragaman kebutuhan dan kapabilitas individu, tidak hanya distribusi material semata. Sen menyoroti agar aspek kesehatan dan pendidikan juga diperhitungkan, sehingga ketidaksetaraan diperbaiki lewat peningkatan kemampuan dasar anak-anak. Pemikiran ini mendorong kebijakan publik yang holistik dan inklusif dalam pemenuhan gizi.

Dalam konteks kebijakan, “pendidikan inklusif” sering dipahami sebagai upaya menghilangkan hambatan akses bagi semua kelompok (termasuk penyandang disabilitas, kelompok adat, wilayah terpencil). Sebagai contoh, Bappenas-IFPRI merancang strategi ketahanan pangan inklusif dalam RPJMN 2025–2029 untuk melindungi golongan rentan, termasuk penyandang disabilitas. Langkah konkritnya meliputi penyediaan dapur umum yang aksesibel dan voucher pangan bagi kelompok rentan. Meski program MBG bersifat universal (menjangkau siswa hingga SLB dan PKBM), prinsip inklusif menuntut perhatian ekstra bagi mereka yang secara fisik atau ekonomi sulit dijangkau.

Literatur kebijakan pangan pendidikan global menegaskan pentingnya program makan sekolah. Studi menunjukkan bahwa program jajanan atau makan siang sehat di sekolah dapat menurunkan stunting, meningkatkan konsentrasi dan kehadiran siswa. Di Indonesia, DBK (Gerakan Sekolah Sehat) dan MBG digabungkan untuk memaksimalkan dampak gizi dan kesehatan siswa. Selain itu, melibatkan pelaku usaha

lokal dalam penyediaan bahan baku MBG dianggap memperkuat ekonomi lokal sekaligus memastikan keberlanjutan program. Ringkasnya, kerangka teoretis menegaskan MBG harus dijalankan secara adil (adil dalam hasilnya untuk anak-anak), menyeluruh (holistik mencakup gizi dan pendidikan), dan inklusif (tidak ada anak yang tertinggal).

3. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi dokumenter dan analisis isi (content analysis). Sumber data terdiri dari dokumen berita lokal dan nasional serta dokumen resmi pemerintah. Sumber nasional meliputi laporan BGN dan kementerian (situs resmi dan media massa), serta perhatian media arus utama (Fajar, IDN Times, CNN Indonesia via sumber agregator, dll). Untuk konteks lokal, digunakan berita dan pengumuman di Bulukumba (portal Diskominfo Bulukumba, Fajar Radar Sulsel, bicara baik Jawapos Sulsel, Berita.News) serta pernyataan pejabat dinas pendidikan dan ketahanan pangan Sulsel/Bulukumba. Data kuantitatif sekunder (misal prevalensi stunting) diambil dari publikasi resmi (SSGI dan pernyataan Pemprov) untuk memvisualisasikan status gizi setempat. Analisis dilakukan dengan membaca dan menandai poin-poin utama yang relevan (insiden MBG, persepsi warga, kendala operasional, serta perspektif keadilan dan inklusivitas), kemudian disintesis dalam narasi koheren. Setiap temuan dibandingkan dengan literatur teori keadilan sosial dan kebijakan inklusif untuk menggali makna yang lebih mendalam.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan MBG di Bulukumba dimulai Januari 2025 sesuai jadwal nasional. Pemerintah kabupaten aktif menyiapkan infrastruktur, antara lain mendirikan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di beberapa kecamatan seperti Ujung Loe, melibatkan TNI-POLRI dan DPRD setempat untuk memastikan kualitas dapur. Kepala Disdikbud Bulukumba bahkan mengeluarkan surat resmi yang menegaskan MBG kembali disalurkan mulai 8 September 2025 setelah sempat dihentikan. Dalam surat tersebut diingatkan agar sekolah penerima menerapkan lima hari sekolah efektif dan aktif mencatat ukuran tinggi-badan murid secara rutin untuk pemantauan gizi.

Namun, sejumlah kejadian menggambarkan kegamangan masyarakat terhadap MBG. Kasus paling menonjol terjadi Mei 2025: di SMPN 2 Bulukumba, sekitar 712 paket nasi goreng MBG yang terima siswa dikeluhkan berbau busuk dan tidak matang sehingga siswa menolak mengonsumsinya[5]. Foto paket nasi tergeletak pun viral. Pihak Dinas BGN setempat (Wahyu Saputra Sakti) membantah makanan itu basi; ia hanya menyebut nasi gorengnya basah karena tipe beras baru. Namun semua sekolah

penerima – mulai dari SMPN 2, SMPN 3, MAN 2, hingga beberapa SD, TK, dan SLB – diketahui mengembalikan paket MBG dengan alasan yang sama. Konflik keterangan ini menimbulkan pertanyaan tentang transparansi mutu makanan. Tindakan siswa menolak paket mencerminkan lemahnya kepercayaan; dalam teori keadilan, hal ini dapat dihubungkan pada kegagalan prinsip Rawls pertama (persamaan kebebasan) karena hak anak atas makanan layak tidak terpenuhi.

Insiden serupa sebelumnya dilaporkan Januari 2025 di SDN 171 Loka (Kec. Ujung Bulu) dengan rumor keracunan usai pesta MBG. Tim kesehatan kabupaten menyimpulkan bukan keracunan, melainkan sensitifitas individu. Meski lembaga berwenang menenangkan, publik tetap waspada: kabar-kabar negatif tersebut cepat menyebar melalui media dan media sosial. Media nasional pun soroti kasus MBG yang terlanjur viral, misalnya IDN Times melaporkan MBG bermasalah di 14 provinsi lain, termasuk isu berulat dan porsi kecil. Komentar aktivis dan jurnalis (Denny Siregar) bahkan mempertanyakan akuntabilitas pemerintah atas isu keracunan, menyatakan pemerintah tidak seharusnya menyalahkan siswa. Temuan ini menunjukkan persepsi publik beragam: sebagian besar menyadari potensi manfaat MBG, tetapi mereka juga menuntut penerapan prinsip keadilan (makanan layak) dan akuntabilitas publik.

Dari sudut operasional, Bulukumba menghadapi kendala khas daerah pinggiran. Ketersediaan pasokan lokal kadang menjadi tantangan: misalnya nasi basah disebabkan beras impor/reguler yang berbeda tekstur. Sistem pengadaan dan distribusi paket MBG juga rentan masalah: laporan LASKAR Sulsel menyebut disparitas anggaran (Rp15.000/paket vs realisasi Rp6.500) dan merekomendasikan audit oleh BPK/APIP karena rawan penyimpangan. Perbedaan biaya ini mengindikasikan potensi ketimpangan sumber daya – parah jika mengorbankan kualitas anak (prinsip keadilan Rawls menuntut sumber daya program harus memberi hasil yang maksimal bagi mereka yang paling rentan). Tekad Pemkab Bulukumba untuk mengundang swasta sebagai “Bapak Asuh Stunting” pada 2023 juga relevan di sini. Kolaborasi 33 pelaku usaha lokal berhasil menekan angka keluarga berisiko stunting menjadi 28,04% pada 2022. Artinya, partisipasi aktif komunitas sangat mungkin meningkatkan efektivitas program gizi; Hal ini sesuai konsep inklusif Sen bahwa masyarakat perlu dilibatkan dalam perencanaan dan pelaksanaan kebijakan pangan.

Grafik 1 memperlihatkan prevalensi stunting di Bulukumba tahun 2023–2024 (SSGI). Terjadi penurunan signifikan dari 33,7% menjadi 25,2% [14], penurunan tertinggi se-Sulsel. Keberhasilan ini mengindikasikan bahwa intervensi gizi lokal (termasuk kampanye edukasi dan MBG) telah memberi dampak positif. Sebagaimana

dicatat oleh Wagub Sulsel, data ini penting agar program lebih tepat sasaran.

Grafik 1. Prevalensi stunting anak (≤ 59 bln) di Kabupaten Bulukumba, 2023–2024 (SSGI). Sumber: Data SSGI Sulsel (2024)[14]. Gambar menunjukkan penurunan 8,5 poin, menegaskan upaya gizi dan pendidikan di Bulukumba berjalan intensif.

Persebaran siswa penerima manfaat MBG juga diuraikan pada Grafik 2. Secara nasional MBG telah mencapai 5,58 juta anak dalam 6 bulan pertama 2025[15]. Kelompok terbesar adalah siswa SD/MI (2,4 juta) dan SMP/MTs (1,53 juta), sementara penerima dari PKBM/SLB tercatat 10.319 siswa. Data ini menegaskan prinsip inklusif: MBG mencakup sekolah reguler maupun non-formal. Namun di Bulukumba (dengan total siswa SD-SMA ~26.000 menurut Dapodik), penerima MBG relatif kecil; kendati demikian, peluang untuk inklusi penuh masih terbuka jika semua sekolah menerapkan program.

Grafik 2. Sebaran penerima MBG menurut jenjang pendidikan (Januari–Juni 2025). Sumber: Badan Gizi Nasional.

Diskusi di Bulukumba harus mempertimbangkan kerangka teori. Gagalnya MBG menyediakan makanan layak (sebagaimana dilaporkan) bertentangan dengan semangat keadilan sosial: program ini semestinya menegakkan fairness dalam hak gizi anak. Kekhawatiran publik mencerminkan permintaan untuk “hasil adil” (just outcome): anak yang terima MBG seharusnya benar-benar mendapatkan gizi optimal. Pendekatan inklusif Sen mengingatkan agar kebutuhan kontekstual siswa diperhatikan. Misalnya, siswa dari keluarga miskin atau dengan kebutuhan khusus (SLB) memerlukan perhatian ekstra agar gizi mencukupi. Pemerintah Bulukumba telah mencoba menjawab ini dengan mewajibkan aktifkan UKS dan pencatatan tinggi-badan siswa, serta menyebarkan UKS ke seluruh sekolah penerima. Langkah-langkah ini mendekati pendekatan holistik Sen (pendekatan kontekstual mencakup kesehatan dan pendidikan).

Secara keseluruhan, hasil dan pembahasan menunjukkan bahwa keberhasilan MBG di Bulukumba sangat bergantung pada kualitas implementasi dan dukungan masyarakat. Kasus makanan tidak layak menjadi pengingat bahwa redistribusi sumber daya (anggaran MBG) harus diiringi tata kelola yang kuat. Teori keadilan sosial mengharuskan agar keuntungan program benar-benar memihak anak-anak terluar, dan masalah ini harus segera ditutup agar ketidakadilan tidak dibiarkan terjadi. Integrasi pihak swasta dan organisasi masyarakat (contoh inisiatif Bapak Asuh, dan pola kemitraan UKM dapat memperkuat sistem pengawasan dan pemenuhan gizi, sejalan dengan konsep inklusif yang menekankan peran serta semua pemangku kepentingan.

5. KESIMPULAN

Pelaksanaan MBG di Bulukumba menggambarkan tantangan penggabungan tujuan sosial dengan praktik operasional lapangan. Dalam konteks keadilan sosial Pancasila, setiap anak seharusnya menerima program dengan mutu setara. Insiden makanan yang tidak layak menunjukkan perlunya penguatan kontrol kualitas dan tata kelola program. Pemerintah Bulukumba telah berinisiatif melibatkan legislator dan UKS untuk pengawasan serta menjalin kemitraan lokal, namun langkah lebih lanjut diperlukan agar ketimpangan (seperti perbedaan biaya/porsi) dihilangkan. Secara nasional, rekomendasi mencakup segera meresmikan payung hukum yang jelas (Perpres MBG) agar program berjalan legal dan akuntabel. Perlu pula audit independen (BPK/BPKP) atas pengelolaan anggaran MBG untuk mencegah penyimpangan.

Secara spesifik untuk Bulukumba, direkomendasikan: (1) Memperketat seleksi dan monitoring penyedia catering MBG; memasang mekanisme evaluasi berkala (stabilo pengaduan), (2) Melanjutkan pelibatan sektor swasta dan masyarakat melalui program kemitraan gizi (contoh “Bapak Asuh Stunting”) demi pembiayaan dan edukasi gizi, (3) Memperluas kolaborasi lintas sektor – Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Polri/TNI, serta komunitas setempat – dalam pelaksanaan MBG dan pemantauan gizi (sinkronisasi data UKS, posyandu, EPPGBM), (4) Menerapkan pelatihan rutin bagi pengelola SPPG dan pembina UKS tentang standar gizi dan higienitas, sesuai semangat program Gerakan Sekolah Sehat.

Implementasi rekomendasi di atas diharapkan tidak hanya memperbaiki program di Bulukumba, tetapi juga memberi pelajaran bagi daerah lain. Secara nasional, mengintensifkan sosialisasi MBG kepada masyarakat dan memastikan transparansi informasi (misalnya rilis rutin capaian gizi, seperti yang dilakukan BGN akan meningkatkan kepercayaan publik. Jika prinsip inklusif dan adil dijaga, MBG berpotensi menggenjot prestasi pendidikan dan menekan beban gizi buruk. Oleh karenanya, pengalaman Bulukumba merefleksikan perlunya kebijakan MBG yang inklusif (tidak hanya slogan) dan akuntabel sebagai bagian dari strategi pembangunan manusia Indonesia ke depan.

6. DAFTAR PUSTAKA

Adhiwakara, dkk. (2025). Prakarsa gerakan sekolah sehat dan MBG dalam peningkatan status gizi peserta didik. *Jurnal Pendidikan dan Kesehatan*.

Aditya, F. (2024). Konsep keadilan sosial dalam Pancasila: Implementasinya dalam kehidupan bermasyarakat. *Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia (JPPI)*, 1(4), 123–132. <https://jurnalistiqomah.org/index.php/jppi/article/view/1423/1185>

Badan Gizi Nasional. (2025, Juni 29). 6 bulan program MBG: BGN paparkan capaian,

tantangan, dan arah kebijakan ke depan. Biro Hukum dan Humas BGN.
<https://www.bgn.go.id/news/berita/6-bulan-program-mbg-bgn-paparkan-capaian-tantangan-dan-arah-kebijakan-ke-depan>

- Berita.News. (2025, Juni 16). Pemkab Bulukumba warning penyedia MBG: Jangan beri makanan tak layak ke anak-anak. <https://berita.news/2025/06/16/pemkab-bulukumba-warning-penyedia-mbg-jangan-beri-makanan-tak-layak-ke-anak-anak/>
- Bulukumbakab.go.id. (2023, Januari 26). Bapak Asuh Stunting berhasil turunkan angka keluarga beresiko stunting. <https://bulukumbakab.go.id/rubrik/bapak-asuh-stunting-berhasil-turunkan-angka-keluarga-beresiko-stunting>
- CIDISS. (2025, Juli 7). MBG program reaches 5.5 million in first 6 months of 2025. <https://cidiss.co/uncategorized-2/mbg-program-reaches-5-5-million-in-first-6-months-of-2025-according-to-provisions/>
- Fajar.co.id. (2025, Mei 24). Paket makan bergizi gratis di Bulukumba keluar bau busuk, siswa tolak konsumsi. <https://fajar.co.id/2025/05/24/paket-makan-bergizi-gratis-di-bulukumba-keluar-bau-busuk-siswa-tolak-konsumsi/>
- Fajar.co.id. (2025, September 26). Prabowo dinilai salahkan siswa usai keracunan MBG, Denny Siregar: Sedih banget jadi rakyat Indonesia. <https://fajar.co.id/2025/09/26/prabowo-dinilai-salahkan-siswa-usai-keracunan-mbg-denny-siregar-sedih-banget-jadi-rakyat-indonesia/>
- Hartono, R. (2025, Juli 9). Ketahanan pangan inklusif: Membuka akses bagi penyandang disabilitas. Super Radio. <https://www.superradio.id/ketahanan-pangan-inklusif-membuka-akses-bagi-penyandang-disabilitas/>
- IDN Times. (2025, September 27). FSGI desak pemerintah moratorium program MBG karena banyak masalah. <https://www.idntimes.com/news/indonesia/fsgi-desak-pemerintah-moratorium-program-mbg-karena-banyak-masalah-00-sbfjr-2s90gx>
- Indonesia.go.id. (2025, Maret 28). Kemendikdasmen dan Badan Gizi Nasional perkuat program makan bergizi gratis untuk siswa. Kemdikbud. <https://indonesia.go.id/kategori/sosial-budaya/9119/kemendikdasmen-dan-badan-gizi-nasional-perkuat-program-makan-bergizi-gratis-untuk-siswa?lang=1>
- Klikkiri – LASKAR Sulsel. (2025, September 27). LASKAR desak audit dan evaluasi total program MBG di Sulsel. <https://klikkiri.co/2025/09/27/laskar-desak-audit-dan-evaluasi-total-program-makan-bergizi-gratis-di-sulsel/>
- Kurniawan, A., Sulistiyo, S., & Widodo, W. (2022). Pengaruh program makan tambahan terhadap capaian peserta didik. *Jurnal Ekonomi dan Pendidikan*, 14(1), 45–59.

Radar Selatan. (2025, September 6). Pengumuman resmi Disdikbud Bulukumba, mulai tanggal ini MBG kembali disalurkan.

<https://radarselatan.fajar.co.id/2025/09/06/pengumuman-resmi-disdikbud-bulukumba-mulai-tanggal-ini-mbg-kembali-disalurkan/>

Sulawesi Selatan Pemprov. (2025, Juni 19). Wagub Sulsel resmikan PEDAS 3 dan GENTING di Bulukumba, alokasikan Rp1 miliar untuk intervensi stunting.

Diskominfo Provinsi Sulsel. <https://sulselprov.go.id/index.php/post/wagub-sulsel-resmikan-pedas-3-dan-genting-di-bulukumba-alokasikan-rp1-miliar-untuk-intervensi-stunting>